

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Proses Pemberian Bantuan BLT/PKH dan Mental Bekerja Kepala Keluarga Di Desa Sei Nadoras Kecamatan Bandar Pasir Mandoge

Dari hasil penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa proses pemberian BLT dilakukan dengan cara terlebih dahulu melakukan pendataan dengan cara mengunjungi rumah warga satu persatu dengan tujuan mengetahui layak atau tidaknya penerima untuk mendapat bantuan berdasarkan kriteria penerima BLT Desa. Hal tersebut dibenarkan dengan pernyataan narasumber dalam penelitian ini yang merupakan warga Desa Sei Nadoras dan juga sebagai penerima BLT yaitu Bapak Muhikbar Harahap (MH) yang menyatakan bahwa:

“sebelum dana desa dicairkan, orang dari perangkat desa lebih dulu melakukan pendataan, dengan cara datang kerumah-rumah warga satu persatu untuk mengetahui layak tidaknya warga tersebut menerima bantuan. setelah dapat nama- nama warga yang berhak dapat bantuan, calon penerima BLT menunggu pencairan kurang lebih sekitar satu bulanan”¹⁸

Perangkat Desa setempat terlebih dahulu mengunjungi rumah-rumah warga satu persatu untuk mendata calon penerima BLT Dana Desa, Setelah dipastikan calon penerima masuk kedalam kriteria selanjutnya data diproses dan di verifikasi selama kurang lebih satu bulan. Jika data penerima sudah terverifikasi dan memenuhi syarat maka calon penerima BLT selanjutnya akan diberi kabar bahwa orang tersebut akan segera menerima BLT sebesar enam ratus

¹⁸Hasil wawancara pribadi dengan Informan MH (Tanggal 26 FEBRUARI 2023 PUKUL 10: 30 WIB)

ribu rupiah di tiga bulan pertama dan dibulan selanjutnya sebesar tiga ratus ribu rupiah.

Mekanisme dan alur pendataan calon penerima BLT-dana Desa, dapat ditentukan sendiri oleh desa dengan mengikuti kriteria yang ditentukan, melaksanakan pendataan secara transparan dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Desa dapat menggunakan data desa sebagai acuan, serta menggunakan DTKS sebagai referensi penerima bantuan PKH, BPNT, serta data Dinas ketenagakerjaan untuk identifikasi penerima bantuan Kartu Prakerja, Jika data penerima JPS tersebut tidak tersedia, maka desa bisa menggunakan data rekapitulasi penerima bantuan dari pendamping program jaring pengaman sosial. Berikut adalah mekanisme pendataan keluarga miskin dan rentan calon penerima BLT- Dana Desa serta penetapan hasil pendataannya:

1. Proses pendataan.
 - a. Perangkat desa menyipakan data desa yang mencakup profil penduduk desa berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas
 - b. Kepala desa membentuk dan memberikan surat tugas kepada Relawan Desa untuk melakukan pendataan kepada keluarga miskin calon penerima BLT- Dana Desa.
 - c. Jumlah pendata minimal 3 orang atau harus berjumlah ganjil.
 - d. Melakukan pendataan di tingkat RT dan RW dengan menggunakan formulir pendataan.

2. Proses Konsolidasi dan Verifikasi

- a. Relawan Desa menghimpun hasil pendataan dari RT, RW atau dusun dan melakukan verifikasi serta tabulasi data, yang mana proses yang dilakukan yaitu mensortir mana-mana warga penerima PKH, BPNT, atau penerima Kartu Prakerja dikeluarkan dari data calon penerima BLT. mengidentifikasi keluarga miskin dan rentan untuk diprioritaskan menjadi penerima BLT-Dana Desa, dan melakukan verifikasi status kependudukan calon penerima BLT-Dana Desa berdasarkan data administrasi kependudukan.
- b. Relawan Desa memastikan keluarga miskin dan rentan seperti perempuan kepala keluarga, warga lanjut usia, penyandang disabilitas menjadi prioritas dan tidak boleh terlewat.
- c. Setiap melakukan verifikasi dan identifikasi keluarga miskin Relawan Desa wajib mengambil foto dan mencantumkan lokasi tempat tinggalnya.
- d. Hasil pendataan barulah diserahkan kepada kepala desa.

Daftar calon penerima BLT-Dana Desa dilaporkan dan disahkan oleh Bupati/Wali Kota, atau dapat diwakilkan ke camat. Untuk penyaluran bulan kedua, desa harus memastikan bahwa data penerima BLT-Dana Desa harus sudah disahkan dan diharapkan sudah tepat waktu dan sasaran nya.

Bansos PKH merupakan terobosan masa kini terkait program penanganan sosial. Seiring dengan perkembangan dunia perbankan yang semakin modern pemerintahanpun turut memanfaatkannya sebagai solusi alternatif untuk media penyaluran bansos agar sampai ke tangan penerima secara lebih efisien.

Pemerintah meluncurkan sistem non-tunai dengan memberi rekening bagi penerima bansos, atas nama nya sendiri, dan rekening tersebut dapat menerima beberapa jenis bansos dengan kegunaanya masing-masing.

Proses penyaluran bansos non-tunai bagi penerima bansos program PKH dilakukan dengan proses yang selaras dengan regulasi yang ada. Tahap penyaluran bansos PKH diawali dengan pemberitahuan dari Kementerian Sosial Pusat kepada Pemerintah Daerah serta instansi vertikal lainnya guna menyiapkan proses pencairan bansos PKH secara non-tunai di daerah-daerah. Proses

1. Proses registrasi ,edukasi dan sosialisasi

- a. Proses registrasi serta pembukaan rekening tabungan bagi penerima Bansos

dilaksanakan oleh bank sebagai lembaga dengan berdasarkan basis data yang sebelumnya sudah ditetapkan berdasarkan data terpadu pada program Fakmis. Dari data Fakmis dijadikan basis data penerima.

- b. Data terpadu itu disatukan oleh tim Kementerian Sosial yang memang bertugas menjalankan tugas-tugas dan program-program pemerintahan di bidang sosial.

- c. Pemerintah melakukan sosialisasi dan pemberitahuan. Tahapan ini biasa disebut dengan pertemuan awal dengan bersurat kepada pihak desa.

- d. Bank Penyalur bansos dan juga pemberi bantuan sosial menjalin koordinasi

dengan Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Sosial di tingkat

Kabupaten

dan juga tingkat Propinsiserta instansi vertikal lainnya yang terkait dengan program ini untuk memastikan terkait keberadaan penerima bantuan sosia

- e. Adapun dalam situasi penerima bantuan sosial sudah terlebih dahulu memiliki rekening untuk salah satu program bantuan sosial misalnya, program BPNT, maka rekening tersebut harus digunakan untuk menerima program bantuan sosial yang lainnya. misalnya penerima BPNT kemudian ditambahkan dengan program PKH dengan satu rekening yang sama.

2. Proses penyaluran

- a. Tahapan atau proses penyaluran bansos PKH ialah dimulai dari pendistribusian dana bansos dari tingkat pusat sampai ke rekening warga sebagai penerima, hingga dilaksanakannya pencairan oleh KPM PKH.
- b. Proses pendistribusian hingga sampainya bantuan ke tangan KPM dilaksanakan oleh lembaga bank hingga sampai ke tangan KPM tanpa dipungut biaya.
- c. Proses penyaluran bansos PKH dilakukan dengan tahapan pemindahbukuan dana dari rekening pemberi bantuan sosial yakni dalam hal ini Dirjen Linjamsos Kemensos RI di bank penyalur kepada rekening pemberi bantuan sosial PKH di bank penyalur langsung ke rekening penerima PKH.
- d. Tahap pemindahbukuan dana dari rekening Pemerintah kepada

penerima hanya berjarak waktu 30 hari. Jadi proses penyaluran di tiap tahap dilakukan sebelum 30 hari itu.

3. Proses pengambilan dana bansos PKH

- a. Penerima bantuan PKH dapat melakukan berbagai kegiatan perbankan seperti pada umumnya, termasuk terkait transfer dan tarik tunai yang dapat dilakukan di e-warong atau Agen Bank atau ATM terdekat. Baik secara mandiri maupun berkelompok.
- b. Bantuan yang sudah masuk ke rekening penerima dapat dilakukan penarikan untuk digunakan sesuai dengan kebutuhannya.
- c. Adapun bagi KPM sebagai nasabah perbankan juga dapat melakukan pengecekan kondisi keuangan atau isi saldo pada tiap tahap penyalurannya.
- d. Adapun bagi KPM lansia atau disabilitas, mereka tetap dapat melakukan transaksi penarikan dana PKH dilakukan di e-warong serta agen bank setempat, atau melalui ATM, Kantor Cabang Bank Penyalur yang tersedia
- e. Pada tahapan terakhir, pendamping sosial melaporkan kepada Koordinator Kabupaten atau Kota terkait jumlah KPM yang telah menerima Bansos dan melakukan pencairan atau tidak terhadap dana PKH di tabungannya.

Dalam penyalurannya baik BLT maupun PKH memiliki tahapan, proses, dan aturan yang berbeda antara keduanya dimana dalam BLT bantuan yang diberikan langsung dan jumlahnya juga ditetapkan sama rata untuk setiap penerima BLT. Sedangkan pada penerima PKH bantuan yang diberikan secara

non-tunai yang mana melalui perantara yaitu pihak bank dan jumlah yang diterimapun berbeda-beda-beda sesuai dengan kategori apa penerima tersebut.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Mental Bekerja Kepala Keluarga Di Desa SeiNadoras Kecamatan Bandar Pasir Mandoge

Dalam kehidupan berumah tangga, peran kepala keluarga adalah sebagai pelindung dan pencari nafkah untuk keluarga. Dalam hal ini mencari nafkah tentulah di lakukan dengan bekerja mencari uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. perekonomian yang dimiliki setiap keluarga berbeda-beda, ada yang termasuk dalam kategori mampu, sederhana dan adapula yang kurang mampu, masing-masing kepala keluarga berusaha keras dalam bekerja untuk memenuhi segala kebutuhan dalam berumah tangga terutama bagi kalangan keluarga yang kurang mampu. keadaan tersebut di perparah dengan adanya pandemi Covid-19 yang datang dengan membawa berbagaimacam dampak terutama di bidang ekonomi. hal ini sejalan dengan pernyataan informan didalam penelitian ini Ibu Niar Sinaga (NS):

“keadaan ekonomi kelurga saya pada dasarnya memang sudah susah, ditambah lagi ada Covid-19 mangkin susah lagi. Suami saya di keluarkan dari tempat dia bekerja dan kami kehilangan matapencarian”¹⁹

Berdasarkan hal inilah pemerintah membuat kebijakan jaring pengaman sosial dari pemerintah salah satunya melalui program BLT/PKH. BLT/PKH diberikan kepada masyarakat kurang mampu untuk membantu perekonomian masyarkat salah satunya di Desa Sie Nadoras. Terlepas dari manfaat dan tujuan dari program tersebut terdapat pula faktor positif dan negatif yang ditimbulkan,

¹⁹ ²⁰ Hasil wawancara pribadi dengan informan NS (Tangga 28 FEBRUARI 2023 JAM 09:25 WIB)

diantaranya yaitu:

1. Dampak positif

- a. Masyarakat merasa terbantu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari
- b. Masyarakat tidak merasa takut dalam menghadapi menurunnya perekonomian
- c. Kurangnya rasa kekhaatiran masyarakat yang kehilangan pekerjaan atau tidak dapat bekerja seperti biasanya
- d. Masyarakat merasa diperhatikan oleh pemerintah
- e. Terwujudnya hidup tentram dilingkungan sosial masyarakat.

2. Dampak negatif

- a. Semakin meningkatnya budaya konsumtif
- b. Menimbulkan sifat malas pada masyarakat sehingga tidak ada usaha dalam memenuhi kebutuhan hidup dikeluarganya
- c. Terjadinya kecemburuan sosial dikalangan masyarakat
- d. Terhambatnya beberapa pembangunan sebagai akibat sebagian dan dialihkan untuk bantuan.

Dampak positif dan negatif yang ditimbulkan oleh adanya program bantuan sosial seperti BLT/PKH sedikit banyaknya mempengaruhi kehidupan masyarakat dalam kesehariannya. Selain itu juga selain dari dampak positif yang ditimbulkan membantu masyarakat berkeluarga namun, tidak dapat dipungkiri bahwa dampak negatifnya juga cukup berpengaruh dan merugikan salah satunya dari bagaimana masyarakat menghadapi dampak negatif tersebut sering kali tidak sadar dan kerap acuh.

Seperti halnya memperbaiki perekonomian bantuan yang diberikan pemerintah juga kerap kali menimbulkan rasa ketergantungan dan malas untuk berusaha memperbaiki perekonomian secara mandiri. Dalam kasus ini informan memberikan informasi bahwasanya bantuan yang didapat oleh sebagian keluarga di Desa Sei Nadoras kerap kali menimbulkan sifat malas dan kebergantungan karena merasa bahwa seluruh biaya kehidupan sudah ditanggung oleh pemerintah. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan informan Rubiah Rodiah (RR) yaitu:

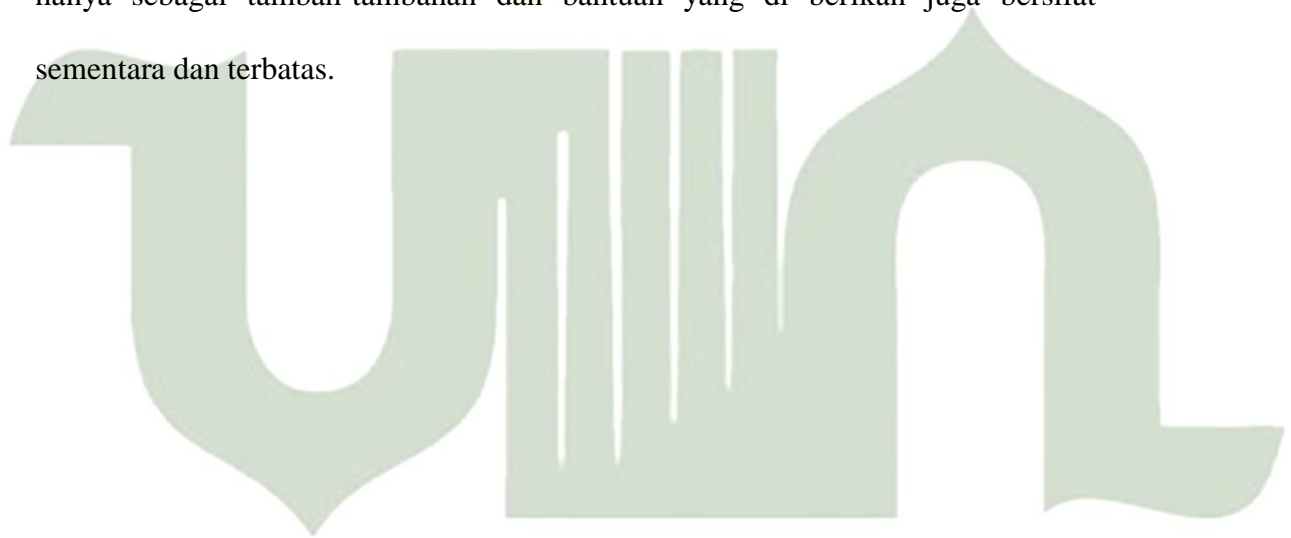
“saya lihat-liat orang-orang yang dapat BLT/PKH sebagian malah malas buat cari kerja yang memang kerjanya, ada kerjanya yang lebih baik dan menghasilkan uang yang lumayan kalau lebih capek tapi malah milih kerjanya mocok-mocok yang kadang uangnya tidak seberapa dengan alasan tiap bulan uang beras udah aman dari pemerintah. Yah walau Cuma sebagian yang kayak gitu tidak semua kebanyakan uang bansos yang dapat itu dipakai buat beli barang-barang yang sebenarnya tidak terlalu mereka butuhkan, malah kadang kewajiban yang harus dipenuhi kadang terbengkalai dan dilupakan gitu aja waktu udah pencairan”²⁰

Informan menjelaskan bahwa program bantuan yang diberikan pemerintah secara tidak langsung menimbulkan rasa malas untuk bekerja, jikapun bekerja hanya seadanya tidak bersungguh-sungguh karena masih berharap besar dengan bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Selain itu juga fungsi dana bantuan yang diberikan sebagian dari penerima tidak menggunakannya sesuai dengan yang diharapkan guna membantu perekonomian, lebih kepada memenuhi

²⁰ Hasil wawancara pribadi dengan informan (Tanggal 2 MARET 2023 JAM 02: 35 WIB)

kebutuhan skunder dari pada primer yang mana keinginan dan gaya hidup didahulukan dari pada kebutuhan utama.

Sifat ketergantungan ini lah yang menjadi faktor pemicu malasnya keluarga dalam usaha memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Mereka sudah terbiasa menerima bantuan demi bantuan untuk mempermudah dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi, namun tanpa disadari hal tersebutlah yang menimbulkan masalah-masalah baru didalam keluarga. Dimana saat kepala keluarga yang seharusnya berperan untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan harian malah jadi enggan bekerja dan hanya mengharapkan bantuan yang sebenarnya jika dilihat tidak sepenuhnya mampu menopang kehidupan berkeluarga melainkan hanya sebagai tambah-tambahan dan bantuan yang di berikan juga bersifat sementara dan terbatas.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN